

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI
APPROVAL E- LOAN SYSTEM
(MODUL PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN DIVISI) PADA PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (UNIT SYARIAH)
KANTOR PUSAT SURABAYA

KERJA PRAKTEK



Nama : Dian Bagus Eka Permana
NIM : 10410100054
Program : S1 (Strata Satu)
Jurusan : Sistem Informasi

SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER
SURABAYA

2013

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah.....	7
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan	10
2.2.1 Visi.....	10
2.2.2 Misi	10
2.2.3 Tujuan PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim)	10
2.3 Filosofi Perusahaan.....	11
2.4 Lokasi Perusahaan	12
2.5 Struktur Organisasi	12
2.6 Fungsi Setiap Bidang pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim)	
Kantor Pusat Surabaya Divisi Syariah.....	13

BAB III LANDASAN TEORI.....	17
3.1 Definisi Sistem.....	17
3.2 Analisa dan Perancangan Sistem Informasi.....	18
3.3 Pengertian Pembiayaan.....	20
3.4 Bank Syariah.....	20
3.5 E-Loan System.....	22
3.6 System Development Life Cycle (SDLC)	25
BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTEK.....	29
4.1 Analisa Sistem	29
4.2 Perancangan Sistem	30
4.2.1 Docflow.....	30
4.2.2 System Flow.....	31
4.2.3 Diagram Jenjang (HIPO)	34
4.2.4 Context Diagram.....	35
4.2.5 DFD Level 0 Sistem Informasi <i>Approval E-Loan System</i>	36
4.2.6 DFD Level 1 Autentikasi User	37
4.2.7 DFD Level 1 Menyetujui AKAD Pembiayaan.....	38
4.2.8 DFD Level 1 Persetujuan AKAD Diluar Pimpinan Cabang	39
4.2.9 Conceptual Data Model (CDM).....	40
4.2.10 Physical Data Model (PDM).....	41
4.2.11 Struktur Tabel	42
4.3 Kebutuhan Sistem	52
4.3.1 Hardware.....	52

4.3.2	Software	52
4.4	Implementasi Input Output	52
4.4.1	Form Autentikasi User	58
4.4.2	Form Halaman Utama Pimpinan Cabang	58
4.4.3	Form Investasi Sekolah Pimpinan Cabang	59
4.4.4	Form Investasi Usaha Pimpinan Cabang	60
4.4.5	Form BPRS Pimpinan Cabang	60
4.4.6	Form PKPA Pimpinan Cabang	61
4.4.7	Form IB Emas Barokah Tetap Pimpinan Cabang	62
4.4.8	Form Utama Pimpinan Divisi	63
BAB V PENUTUP		65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN.....		68
	Lampiran 1 Kartu Bimbingan.....	69
	Lampiran 2 Surat Balasan.....	71
	Lampiran 3 Acuan Kerja.....	72
	Lampiran 4 Garis Besar Acuan.....	73
	Lampiran 5 Log Harian Kerja Praktek.....	74
	Lampiran 6 Kehadiran Kerja Praktek.....	75

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI
APPROVAL E- LOAN SYSTEM
(MODUL PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN DIVISI) PADA PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (UNIT SYARIAH)
KANTOR PUSAT SURABAYA

KERJA PRAKTEK

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana Sistem Informasi

Disusun Oleh :

Nama : Dian Bagus Eka Permana

NIM : 10.41010.0054

Program : S1 (Strata Satu)

Jurusan : Sistem Informasi

SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER
SURABAYA

2013

ABSTRAKSI

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) merupakan bank daerah yang melayani transaksi perbankan yang sama dengan bank-bank pada umumnya. Salah satu transaksi yang terdapat dalam bank jatim adalah pembiayaan, dimana pembiayaan adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk nasabah dengan beberapa kategori atau kelompok. Untuk memberikan peminjaman kepada nasabah maka dibutuhkan persetujuan dari Pimpinan Cabang dan proses tersebut membutuhkan waktu yang lumayan lama sehingga pelayanan dari Bank Jatim pun kurang maksimal.

Untuk memenuhi semua kebutuhan yang berhubungan dengan nasabah maka butuh sebuah aplikasi sistem informasi yang dapat mengatur dan mengelola pembiayaan sehingga proses yang terjadi dapat maksimal dan memberikan kepuasan terhadap nasabah. Sistem Informasi tersebut mampu memberikan pelayanan berupa kecepatan untuk mengambil suatu keputusan dalam setiap pembiayaan.

Sistem informasi *Approval E-Loan System* adalah aplikasi web yang berguna untuk melakukan pencatatan kesuruhan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, sehingga pembiayaan dapat diputuskan secepatnya tanpa membutuhkan waktu yang lama. Aplikasi ini juga membantu Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi untuk memberikan keputusan secara cepat sehingga berdampak pada pelayanan untuk nasabah.

Dengan adanya sistem informasi *E-Loan system* ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pembiayaan yang sudah ada sebelumnya dan di harapkan dapat memberikan kemudahan peminjaman dengan tujuan peminjaman dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga penerapan sistem ini mampu memberikan pelayanan untuk nasabah yang ingin melakukan peminjaman.

Kata Kunci : *Sistem Informasi, Approve, E-Loan system*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam sektor perbankan atas berdasarkan Syariah agama islam. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perusahaan untuk unit Syariah adalah mengelola mengelola keuangan nasabah dengan menggunakan fa'idah dalam agama islam.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) yang berkantor pusat di Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya, mempunyai satu kantor cabang Syariah yang bertempat di Jl. Raya Darmo no. 107 Surabaya akan tetapi mempunyai 47 kantor layanan syariah yang bertempat di cabang conventional diseluruh Kabupaten di Jawa Timur.

Kebutuhan sistem dari Bank Jatim unit syariah adalah pencatatat pembiayaan secara terintegrasi sehingga untuk pengajuan proses pembiayaan tidak berlangsung cukup lama. Hal tersebut dapat berpengaruh pada pelayanan untuk nasabah tanpa nasabah menunggu proses pengajuan terlalu lama.

Maka dari itu Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) menginginkan adanya suatu sistem informasi *E-Loan System* yang dapat melakukan pencatatan seluruh nasabah baru yang ingin mengajukan pembiayaan secara syariah agama islam.

Dengan sistem pencatatan pembiayaan yang terkomputerisasi dan terintegrasi, maka dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat, cepat dan dapat meminimalkan terjadinya potensi kesalahan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun sistem informasi E-Loan System pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) agar dapat menjadi acuan dalam pencatatan pembiayaan untuk nasabah ?
2. Bagaimana menampilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh bagian Pimpinan Cabang hingga Pimpinan Divisi terkait dengan pencatatan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut :

1. Perancangan sistem informasi *E-Loan System* ini hanya mencakup proses pengajuan pencatatan pembiayaan nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah).
2. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MYSQL dalam pengerjaannya.
3. Aplikasi ini hanya mencakup dari Pimpinan Cabang ke Pimpinan Divisi

1.4 Tujuan

Berdasarkan batasan masalah diatas maka tujuan dari kerja praktek ini adalah :

1. Membuat sistem informasi E-Loan System pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) sehingga dapat menjadi acuan dalam pencatatan pembiayaan nasabah baru.
2. Dapat menampilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh bagian Pimpinan Cabang hingga Pimpinan Divisi terkait dengan pencatatan pembiayaan nasabah baru.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah dapat memberikan suatu informasi yang mencakup bagian Account Officer hingga Pimpinan Divisi dalam hal pencatatan pembiayaan nasabah baru sebagai acuan informasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar pada setiap bab-bab yang akan dibahas didalamnya, akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, sistematika penulisan laporan kerja praktek.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

Pada bab ini dijelaskan Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah), Tentang Sejarah Singkat Perusahaan, Visi, Misi, dan Tujuan, Lokasi Perusahaan, serta Struktur Organisasi.

BAB III LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam membantu proses analisa dan desain sistem, yaitu Sistem Informasi, Analisa dan Perancangan, Arsip, Bagan Alir Sistem, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, serta interaksi manusia dengan komputer.

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTEK

Berisi penjelasan mengenai perancangan sistem yang akan digunakan, implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat, dan evaluasi terhadap sistem yang telah diuji coba.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan mengenai sistem yang telah dibuat berupa sistem E-Loan System pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) dan saran untuk perbaikan sistem di masa mendatang.

LAMPIRAN

Dalam bagian ini penulis menyertakan beberapa lampiran yang menunjang kerja praktek ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas(PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah(BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dihadapan Notaris Untung Darnosowirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007.

Di tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

2.2.1 Visi

Berikut adalah visi dari PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) :

1. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
2. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional

1.2.2 Misi

Berikut adalah misi dari PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim):

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah
2. Memperoleh laba optimal

2.2.3 Tujuan PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim)

Tujuan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) adalah dapat memberikan (deliverable) suatu value kepada konsumennya, antara lain:

1. *Satisfaction* (Kepuasan Pelanggan)

Senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan melalui kegiatan pelayanan dengan metode dan mekanisme yang berlaku.

2. *Motivator* (Motivator)

Berkomitmen untuk selalu menjadi motivator dalam meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang professional dengan dilandasi iman dan takwa.

3. *Accurate* (Tepat)

Bertindak tepat dan cepat dalam mewujudkan kinerja perusahaan.

4. *Reputable* (Nama Baik)

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perusahaan.

5. *Totality* (Totalitas)

Bertindak dan bersikap secara total dalam menciptakan kepedulian sosial bagi masyarakat di lingkungan perusahaan.

2.3 Filosofi Perusahaan

Bank Jatim dilandasi filosofi pelayanan dan kepercayaan untuk mengatasi masalah perekonomian di masyarakat luas. Pelayanan disini adalah memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada nasabah sehingga memberikan rasa aman kepada nasabah.

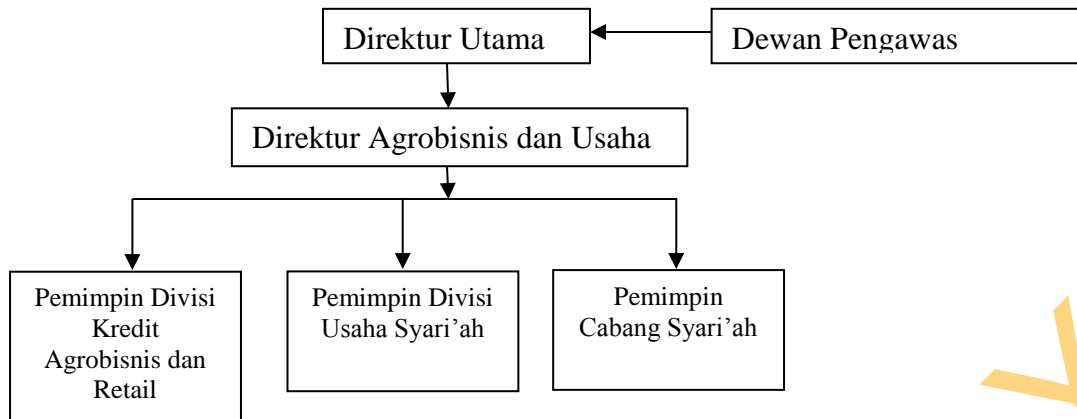
Agar semua tersebut dapat tercapai dengan baik maka dibutuhkan kesigapan dari Bank Jatim untuk melayani ataupun dekat dengan masyarakat luas sehingga kemudahan dan hubungan antar masyarakat terhadap Bank Jatim dapat terjalin dengan baik.

2.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya tepatnya berada di Jalan Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya 60271. Sedangkan tempat kerja penulis selama melaksanakan Kerja Praktek berada di bagian Syari'ah. Ruang kerja staf nyaman, tenang dan sejuk. Selain itu juga disediakan berbagai fasilitas penunjang untuk penulis melaksanakan Kerja Praktek.

2.5 Struktur Organisasi

Untuk menguraikan struktur organisasi dari PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) kantor pusat Surabaya, maka harus kita ketahui terlebih dahulu tujuan dan struktur organisasi ini yaitu agar pembagian tugas dapat merata dan terselesaikannya tugas-tugas di setiap bagian. Adapun struktur organisasi di PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) kantor pusat Surabaya pada divisi Syari'ah.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim)

2.6 Fungsi Setiap Bidang pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya Divisi Syari'ah

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) terdiri dari 2 tingkat jabatan (Direktur) yang memiliki bidang Direktur Utama, Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah, Pmpinan Divisi Kredit Agrobisnis & Retail, Pimpinan Divisi Usaha Syariah, Pimpinan Cabang Syariah. Para Direktur dan Pimpinan Syariah memiliki pejabat tertinggi yaitu Dewan Pengawas Syariah. 2 tingkat jabatan tersebut antara lain :

1. Direktur Utama

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya direktur harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty) dan kedua yaitu prinsip duty of skill and care atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direktur.

Berikut ini uraian menyangkut Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama. Tugas & Tanggung jawab Direktur Utama sebuah bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun Direks dan diketahui Dewan Komisaris.

2. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk, pengelolaan keuangan dalam hal penghimpunan dan pelepasan dana.
3. Berwenang menandatangani Cek dan Bilyet Giro, Bilyet Deposito, Perjanjian Kredit, dengan Pihak ke Tiga (Bank Kreditor) berdasarkan ketetapan Dewan Komisaris.
4. Berwenang melakukan survey calon debitur dan memutus kredit sesuai wewenang komite kredit yang ditetapkan Dewan Komisaris.
5. Berwenang menandatangani Perjanjian Kredit Debitur dengan berdasarkan pada Keputusan Persetujuan dari Komite Kredit.
6. Berwenang menandatangani dokumen pembukaan dan laporan keuangan bank ke Bank Indonesia dan Instansi lain terkait.
7. Bertanggung jawab terhadap perekrutan, pengembangan, peningkatan kemampuan kerja (kompetensi), kesejahteraan, dan pemberhentian SDM Bank.
8. Berwenang untuk mengajukan hapus buku dan hapus tagih Debitur bermasalah dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
9. Bertanggung jawab atas hasil operasional perusahaan dengan persetujuan RUPS.
10. Berwenang membeli dan menjual Aktiva Tetap milik perusahaan dengan sepengetahuan Dewan Komisaris.
11. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang dipandang baik untuk kelancaran operasional perusahaan.

2. Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah

Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah mempunyai tugas, antara lain:

1. Menyiapkan penyusunan program kerja dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan bisnis usaha syariah, pencapaian program kerja dan analisis serta evaluasi program kerja.
2. Menyiapkan penyusunan program kerja, dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan bisnis usaha syariah terhadap unit kerja.
3. Menyiapkan penyusunan program kerja, dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan asset usaha syariah.

STIKOM SURABAYA

BAB III

LANDASAN TEORI

1.1 Definisi Sistem

Menurut (Herlambang & Tanuwijaya, 2005) definisi sistem dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur pendekatan secara komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam perkembangan sistem yang ada, sistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada sistem terbuka merupakan sistem yang dihubungkan dengan arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen pengendali. Sistem tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan dihubungkan pada lingkungan sekitarnya.

Menurut (Sukoco, 2007) Sistem terdiri dari subsistem yang berhubungan dengan prosedur yang membantu pencapaian tujuan. Pada saat prosedur diperlukan untuk melengkapi proses pekerjaan, maka metode berisi tentang aktivitas operasional atau teknis yang menjelaskannya.

Beberapa manfaat digunakannya pendekatan sistem adalah :

1. Mengoptimalakan hasil dari penggunaan sumber daya yang efisien
2. Salah satu alat pengendali biaya
3. Untuk mengefisiensikan aktivitas yang dilakukan dalam kantor
4. Alat bantu pencapaian tujuan organisasi
5. Alat bantu organisasi dalam menerapkan fungsi-fungsinya

Adapun kerugiaanya adalah sebagai berikut :

1. Pengoperasian yang kurang fleksibel dan menjadikan sistem tidak berfungsi optimal
2. Tuntutan lingkungan untuk mengubah sebuah metode atau prosedur akan menyebabkan perubahan pada metode atau prosedur bagian atau departemen yang lain.
3. Perlunya waktu sosialisasi bagi sebuah metode, prosedur, atau sistem baru yang diterapkan perusahaan
4. Kemungkinan terdapat resistensi dari anggota organisasi

1.2 Analisa dan Perancangan Sistem Informasi

Analisa sistem merupakan tahap yang paling penting dari suatu pemrograman, karena merupakan tahap awal untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi serta kendala-kendala yang dihadapi

Analisa yang efektif akan memudahkan pekerjaan penyusunan rencana yang baik di tahap berikutnya. Sebaliknya, kesalahan yang terjadi pada tahap analisa ini akan menyebabkan kesulitan yang lebih besar, bahkan dapat menyebabkan penyusunan sistem gagal.

Untuk itu diperlakukan ketelitian didalam mengerjakan sehingga tidak terdapat kesalahan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan sistem. Langkah-langkah yang diperlukan didalam menganalisa sistem adalah :

- a. Tahap perencanaan sistem
- b. Tahap analisa sistem
- c. Tahap perancangan sistem
- d. Tahap penerapan sistem
- e. Membuat laporan dari hasil analisa

Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi masalah serta diperlukan adanya analisa yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam sistem yang telah ada atau digunakan.

Data-data yang baik yang berasal dari sumber-sumber internal seperti misalnya laporan-laporan, dokumen, observasi maupun dari sumber-sumber eksternal seperti pemakai sistem, dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan analisa. Jika semua permasalahan telah diidentifikasi, dilanjutkan dengan mempelajari dan memahami alur kerja dari sistem yang digunakan.

Kemudian diteruskan dengan menganalisa dan membandingkan sistem yang terbentuk dengan sistem sebelumnya. Dengan adanya perubahan tersebut langkah selanjutnya adalah membuat laporan-laporan hasil analisa sebelumnya dan sistem yang akan diterapkan. Perancangan sistem adalah proses menyusun atau mengembangkan sistem informasi yang baru. Dalam tahap ini harus dipastikan bahwa semua persyaratan untuk menghasilkan informasi agar terpenuhi.

Hasil sistem yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan pemakai, karena rancangan tersebut meliputi perancangan mulai dari sistem yang umum hingga diperoleh sistem yang lebih spesifik. Dari hasil rancangan sistem tersebut dibentuk pula rancangan database disertai struktur file antara sistem yang satu dengan yang lain. Selain itu dibentuk pula rancangan keluaran dan masukan (input dan output) sistem misalnya menentukan berbagai bentuk dan isi laporan berserta pemasukan data.

Apabila didalam perancangan sistem terdapat kesalahan, maka kita perlu melihat kembali analisa dari sistem yang telah dibuat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa sistem mempunyai hubungan erat dengan perancangan sistem.

1.3 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Syafii Antonio. (2001;160), pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Muhammad (2002;260), pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

1.4 Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Muhammad (2002) dan Donna (2006), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Sejarah perbankan syariah Sebelum dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 di Indonesia sudah ada jenis bank khusus yang dalam operasionalnya menganut prinsip syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dasar pendirian Bank Muamalat Indonesia ini adalah UU No.7 pasal 12 tahun 1992, yang menjelaskan tentang pengertian kredit yang di dalamnya terdapat kalimat imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Gagasan pendirian bank berdasarkan prinsip syariah ini dimulai sejak lokakarya bank tanpa bunga yang diadakan di

Cisarua, Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian didukung dan diprakarsai oleh pejabat-pejabat penting dan pengusaha-pengusaha yang berpengalaman di bidang perbankan, bahkan presiden R.I yang kedua saat itu juga ikut beserta Wakilnya juga ikut dan bersedia menjadi pendukung utama Bank Muamalat Indonesia ini. Tetapi saat itu bank-bank lain yang masih bersifat konvensional tidak ada mengeluarkan suatu kebijakan tentang bank berdasarkan prinsip syariah, hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang dijadikan dasar untuk mengatur tentang prinsip syariah dalam bank yang sudah ada, hingga dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 barulah bank-bank konvensional mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan cara membuka cabang-cabang baru. Prinsip Bank Syariah Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

2.5 E-Loan System

E-Loan system adalah sistem informasi yang mendukung operasional bisnis perusahaan. Sistem informasi menggunakan sistem aplikasi web base sehingga untuk menjalankan harus menggunakan internet explore. Sistem E-Loan adalah sistem yang terintegrasi dengan pengertian semua aspek operasional bisnis perusahaan dalam tercapuk dalam sistem ini. Selain itu sistem ini mempunyai kemampuan fleksibilitas yang tinggi untuk mengikuti kebutuhan dari perusahaan bahwa dapat diterapkan sebagai sistem yang sentralisasi dan distribusi sekaligus dalam satu sistem tersebut.

Fitur-fitur yang tersedia dalam sistem mencakup semua kebutuhan perusahaan dalam melaksanakan operasional dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing dalam pasar yang sejenis.

Fitur-fitur tersebut (*E-Loan presentation by Ad-Ins, 2001*) adalah :

1. *Multi assets*, adalah fitur yang memungkinkan dalam satu kontrak terdiri dari beberapa asset.
2. *Multi disbursement*, adalah fitur yang memungkinkan dalam satu pembayaran untuk beberapa kontrak sekaligus.
3. *Multi format auto notification*, adalah fitur yang menggunakan SMS, Fax, E- mail dan surat untuk keperluan persetujuan transaksi di luar standard, persetujuan lain dan ucapan selamat untuk konsumen atau dealer.
4. *Collection System*, adalah fitur penagihan angsuran dimana untuk alokasi penagih dan surat pemberitahuan ke konsumen dapat melalui SMS.
5. *Contract Amendment Handling Facility*, adalah fitur yang menyediakan bahwa fasilitas untuk pengantian asset, *rescheduling* dan pengalihan kontrak.
6. *Incentive/ Bonus Administration*, adalah fitur yang menyediakan fasilitas untuk perhitungan *incentive* ke dealer dengan berbagai syarat yang dapat dirubah setiap saat
7. *Insurance Administration System*, adalah fitur yang menyediakan fasilitas untuk semua administrasi yang berhubungan dengan asuransi, seperti penutupan asuransi dan klaim asuransi.
8. *Syndication, Channeling, Securitization* adalah fitur yang mendukung perusahaan dalam melakukan penjualan asset ke pihak ke III.
9. *Cross Collateral Facility*, adalah fitur yang menyediakan fasilitas pengikatan antar 2 kontrak atau lebih.

10. *Online credit application via internet*, adalah fasilitas untuk pemberian persetujuan kredit apabila yang berwenang tidak ada di kantor, sehingga dapat melalui internet.
11. *Multi stage approval*, adalah fasilitas yang memungkinkan untuk secara otomatis mengirimkan approval apabila orang yang memberikan persetujuan, wewenang belum mencukupi.
12. *Inter-branch transaction*, adalah fitur yang menyediakan fasilitas untuk pembayaran yang dilakukan tidak di cabang asal konsumen, sehingga konsumen diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran di seluruh cabang.
13. *Partial Payment*, adalah fitur yang mempermudah konsumen, apabila konsumen karena suatu hal tidak dapat melakukan pembayaran angsuran secara penuh atau hanya sebagian saja.
14. *Profitability analysis*, adalah fitur yang dapat membantu top manajemen dalam menganalisis profit yang telah dicapai oleh perusahaan setiap saat
15. *Smart & flexible reporting*, adalah fasilitas pembuatan laporan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
16. *Audit trail*, adalah fitur yang memungkinkan mengetahui kesalahan apa yang telah diperbaiki, sehingga sangat membantu untuk internal audit perusahaan dalam melakukan pengecekan ke operasional perusahaan
17. *Negative List for Customer & Supplier*, adalah fitur yang memungkinkan pengecekan apakah konsumen yang akan memperoleh fasilitas pembiayaan bukan merupakan konsumen yang mempunyai karakter jelek

3.6 System Development Life Cycle (SDLC)

SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi :

1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi
2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan
3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi
4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik
5. Menentukan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
6. Merancang sistem informasi baru
7. Membangun sistem informasi baru
8. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru
9. Memelihara dan melakukan perbaikan/peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan

System Development Lyfe Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model SDLC. Model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Beberapa model lain SDLC misalnya *fountain, spiral, rapid, prototyping, incremental, build & fix*, dan *synchronize & stabilize*. Dengan siklus SDLC, proses membangun sistem dibagi menjadi beberapa langkah dan pada sistem yang besar, masing-masing langkah dikerjakan oleh tim yang berbeda. Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat enam langkah. Jumlah langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah sama. Langkah tersebut antara lain :

1. Analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan
2. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem
3. Perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi
4. Pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan
5. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat
6. Implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat

Siklus SDLC dijalankan secara berurutan, mulai dari langkah pertama hingga langkah keenam. Setiap langkah yang telah selesai harus dikaji ulang, kadang-kadang bersama expert user, terutama dalam langkah spesifikasi kebutuhan dan perancangan sistem untuk memastikan bahwa langkah telah dikerjakan dengan benar dan sesuai harapan. Jika tidak maka langkah tersebut perlu diulangi lagi atau kembali ke langkah sebelumnya.

Kaji ulang yang dimaksud adalah pengujian yang sifatnya *quality control*, sedangkan pengujian di langkah kelima bersifat *quality assurance*. *Quality control* dilakukan oleh personal internal tim untuk membangun kualitas, sedangkan *quality assurance* dilakukan oleh orang di luar tim untuk menguji kualitas sistem. Semua langkah dalam siklus harus terdokumentasi. Dokumentasi yang baik akan mempermudah pemeliharaan dan peningkatan fungsi sistem.

STIKOM SURABAYA

BAB IV

DESKRIPSI KERJA PRAKTEK

2.1 Analisa Sistem

Dalam pengembangan teknologi informasi ini dibutuhkan analisa dan perancangan ssstem pengolah data. Sistem pengolah data tersebut diharapkan mampu mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia khususnya untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).

Metode ini membutuhkan analisis internal dan eksternal organisasi, kebutuhan bisnis dan beberapa teknik analisis untuk menghasilkan perencanaan yang baik. Data dan informasi yang dibutuhkan ialah berkenaan dengan tujuan dari pembuatan sistem informasi *Approval E-Loan System* yang meliputi pencatatan pengajuan pembiayaan dan persetujuan pembiayaan. Untuk membuat sistem informasi *Approval E-Loan System* dibutuhkan data-data nasabah dan pengajuan pembiayaan yang diminta nasabah sehingga dapat menghasilkan perencanaan SI yang dapat mendukung strategi operasional dari pembiayaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa diperlukan basis data untuk mmenyimpan data nasabah yang sudah terdaftar dan nasabah yang yang mengajukan pembiayaan dan sudah di verifikasi

2.2 Perancangan Sistem

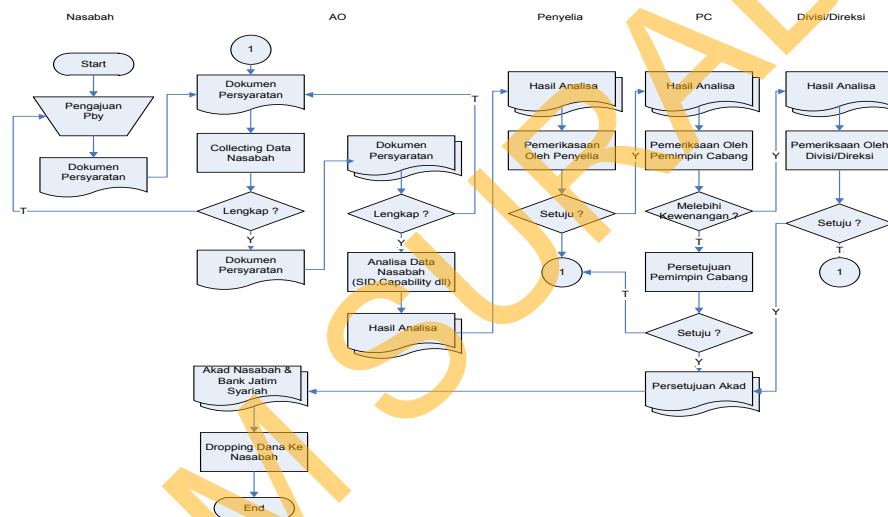
Perancangan sistem dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah pada sistem yang sedang berjalan saat ini sehingga dapat menjadi lebih baik dengan adanya sistem terkomputerisasi. Dalam merancang sistem yang baik, harus melalui tahap-tahap perancangan sistem. Tahap-tahap perancangan sistem adalah meliputi :

1. Alur dokumen yang terkait (*Docflow*)

2. Pembuatan alur sistem aplikasi (*System Flow*)
3. Diagram berjenjang (HIPO)
4. DFD (*context diagram, level 0 dan level 1*),
5. ERD (*Entity Relationship Diagram*) yaitu CDM (*Conceptual Data Model*) dan PDM (*Physical Data Model*).

2.2.1 Docflow

Berikut ini adalah aliran dokumen dari proses pembiayaan yang sudah tersedia pada PT. ank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah).



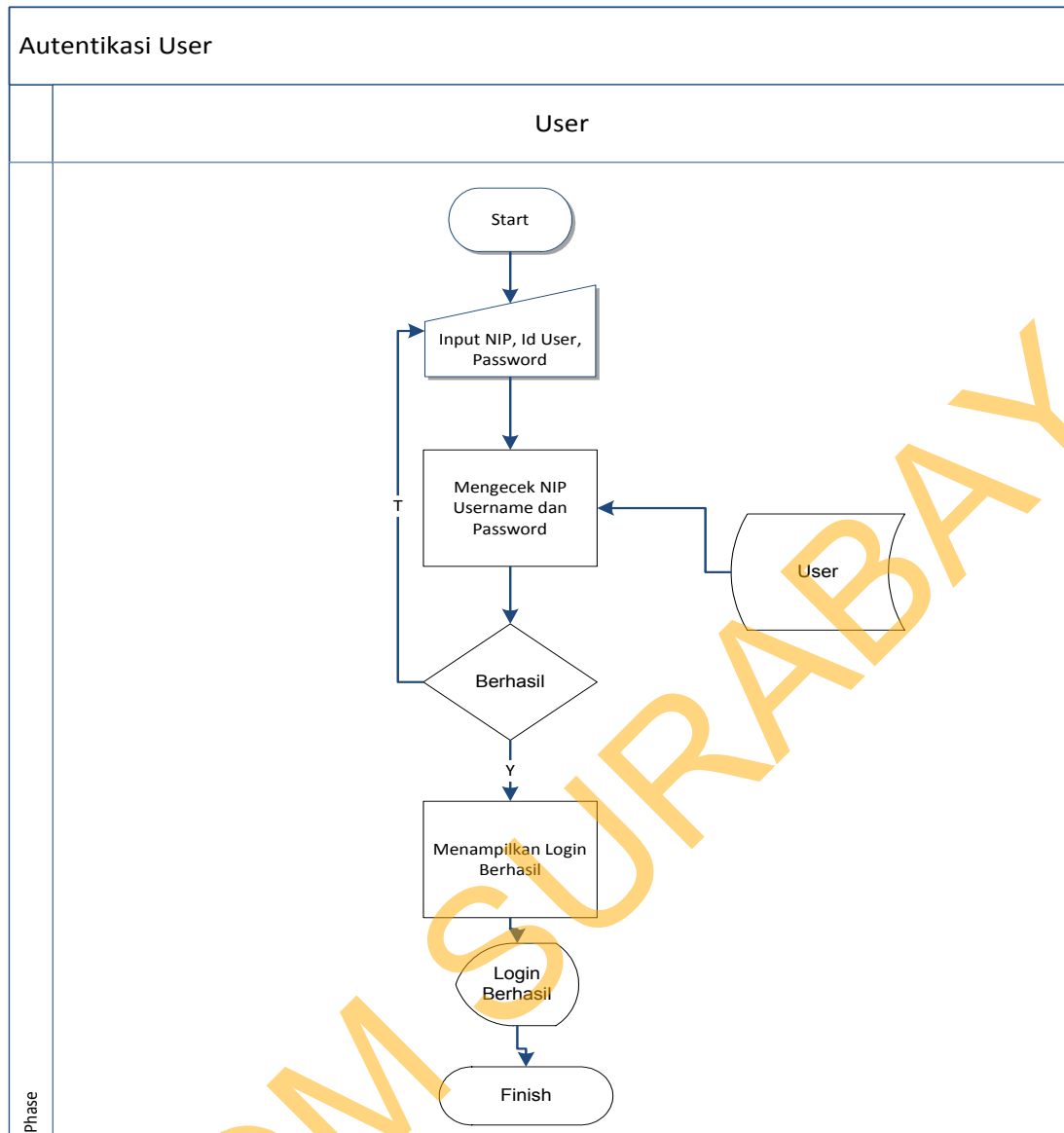
Gambar 4.1 Dokumen Flow Pencatatan Pembiayaan

2.2.2 System Flow

Berikut ini akan digambarkan *System Flow* dari Sistem Informasi yang akan dibuat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah).

1. *System Flow* Login User

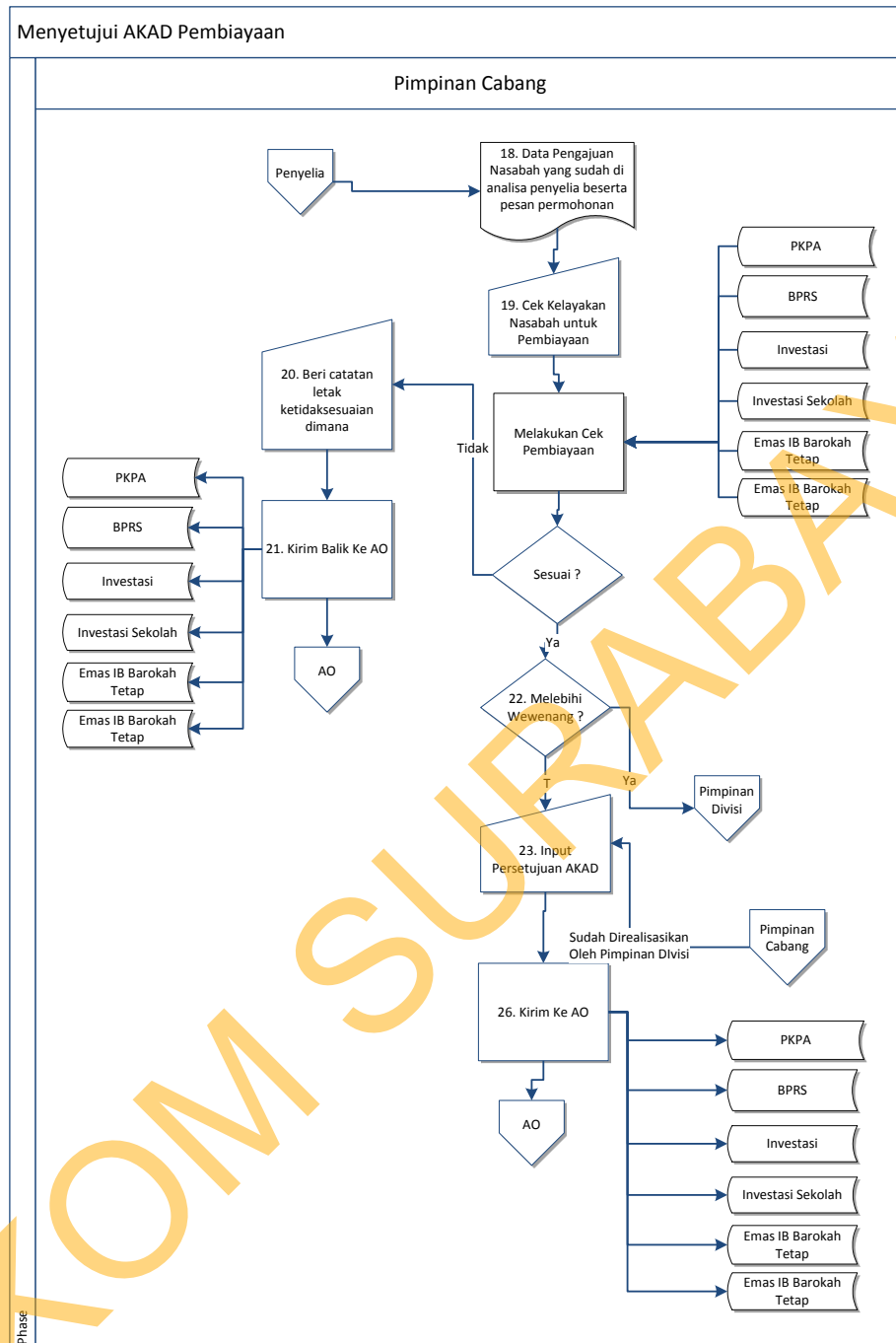
Dalam *system flow* ini akan dijelaskan proses login user sebelum masuk ke dalam sistem / menu utama aplikasi *Approval E-Loan System*.



Gambar 4.2 Sisflow Login User

2. *System Flow* Menyetujui AKAD Pembiayaan

Dalam *system flow* ini akan dijelaskan bagian Pimpinan Cabang akan melakukan analisa dan menyetujui pembiayaan AKAD Pembiayaan dari pengajuan nasabah yang dikirim melalui AO

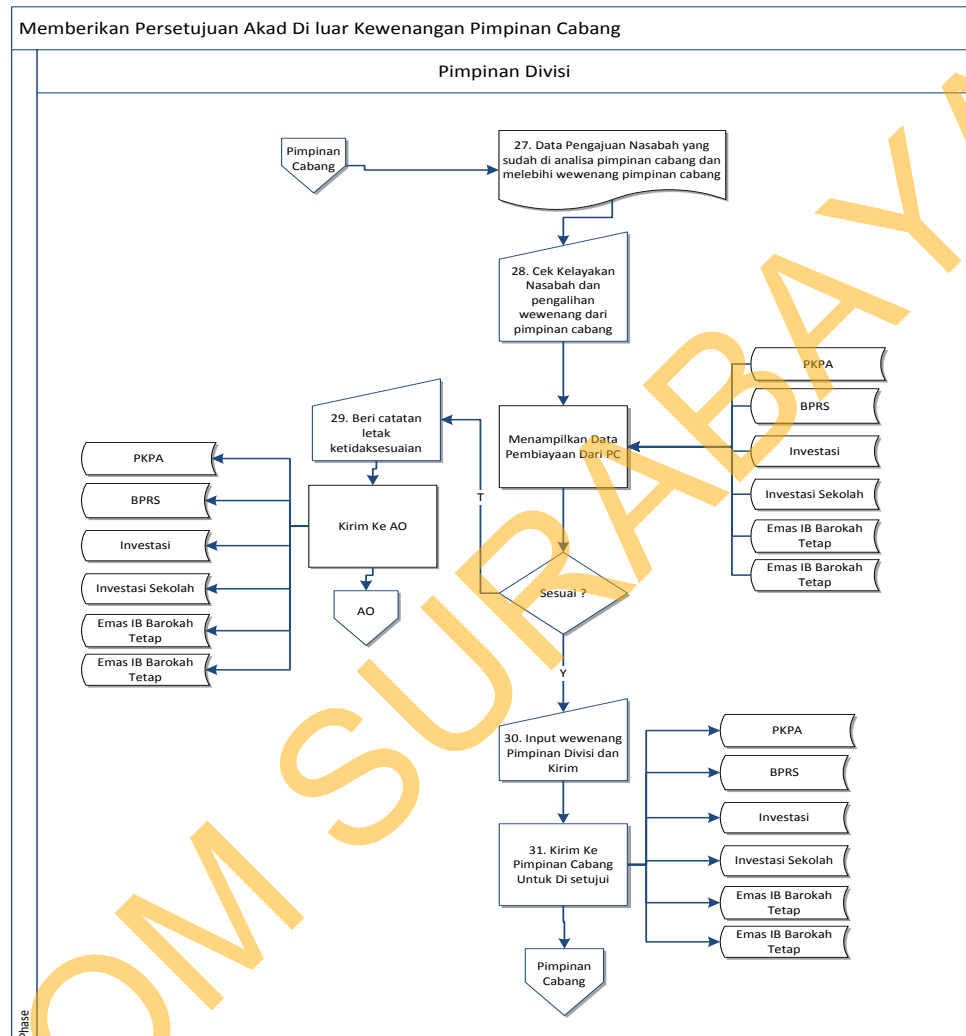


Gambar 4.3 Sisflow Menyetujui AKAD Pembiayaan

3. *System Flow* memberikan persetujuan AKAD di luar kewenangan Pimpinan Cabang

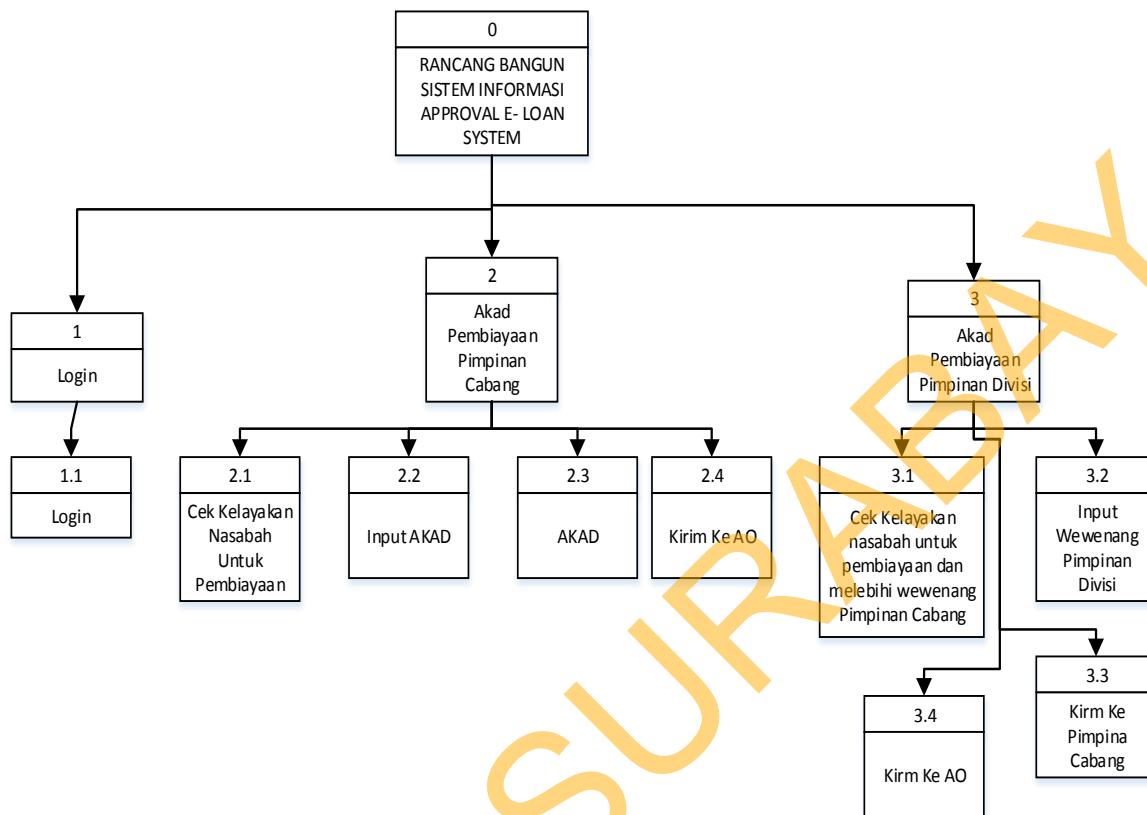
Dalam *system flow* ini akan dijelaskan bagian Pimpinan Divisi memberikan persetujuan AKAD kepada nasabah dimana persetujuan tersebut diberikan karena ada hal-hal

tertentu yang bersifat diluar kewenangan Pimpinan Cabang, setelah melakukan persetujuan kemudian dikirim kembali ke Pimpinan Cabang untuk dikirim ke AO.



Gambar 4.4 Sisflow Memberikan Persetujuan AKAD Di luar Kewenangan Pimpinan Cabang

2.2.3 Diagram Jenjang (HIPO)



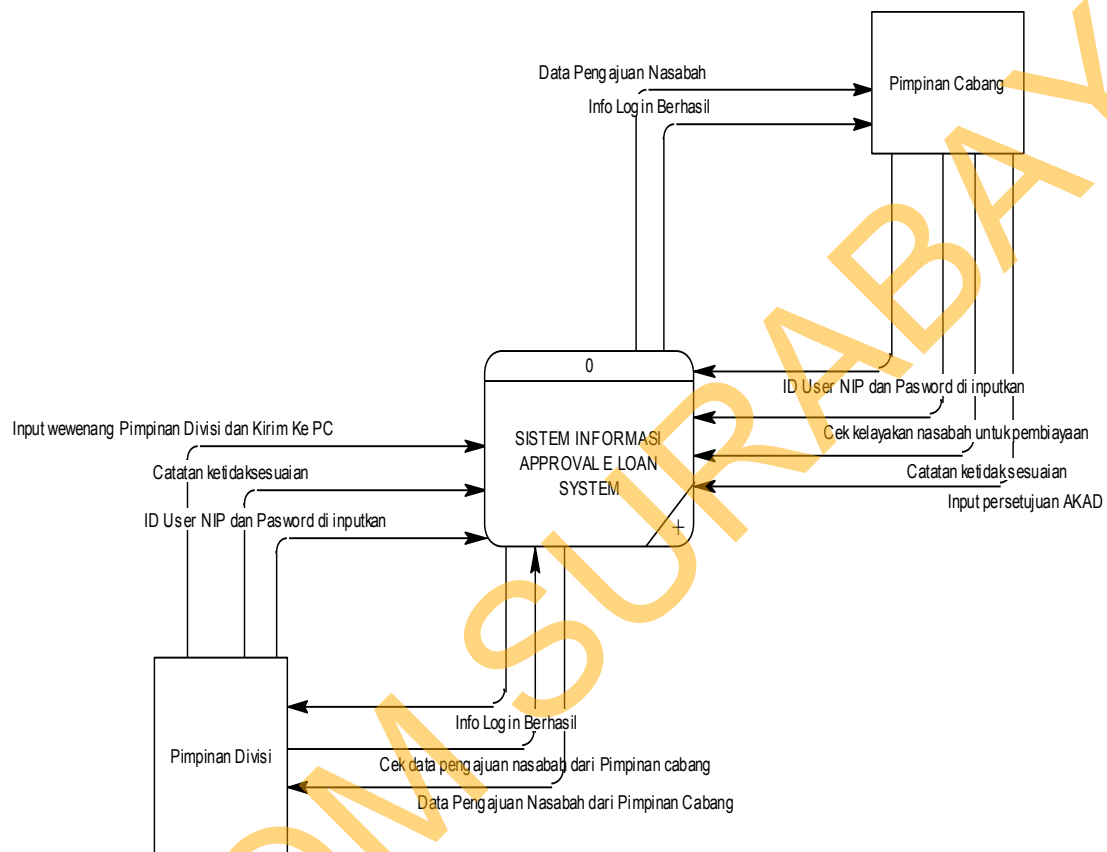
Gambar 4.5 Diagram Jenjang Rancang Bangun Sistem Informasi *E-Loan System*

Diagram jenjang diatas sesuai dengan proses yang terdapat dalam Sysflow dari setiap fungsi user yang ada. Aktivitas dari aplikasi tersebut bertujuan untuk melakukan analisa dan mengirim dari setiap tingkatan user sehingga proses bisnis yang dapat berjalan dengan baik. Semua aktiitas setelah di analisa dan di ambil keputusan yaitu persetujuan akan dilakukan pengiriman kembali ke user awal yaitu AO. Semua sistem yang terdapat aplikasi mampu mengintegrasikan user-user yang memiliki hak akses.

2.2.4 Context Diagram

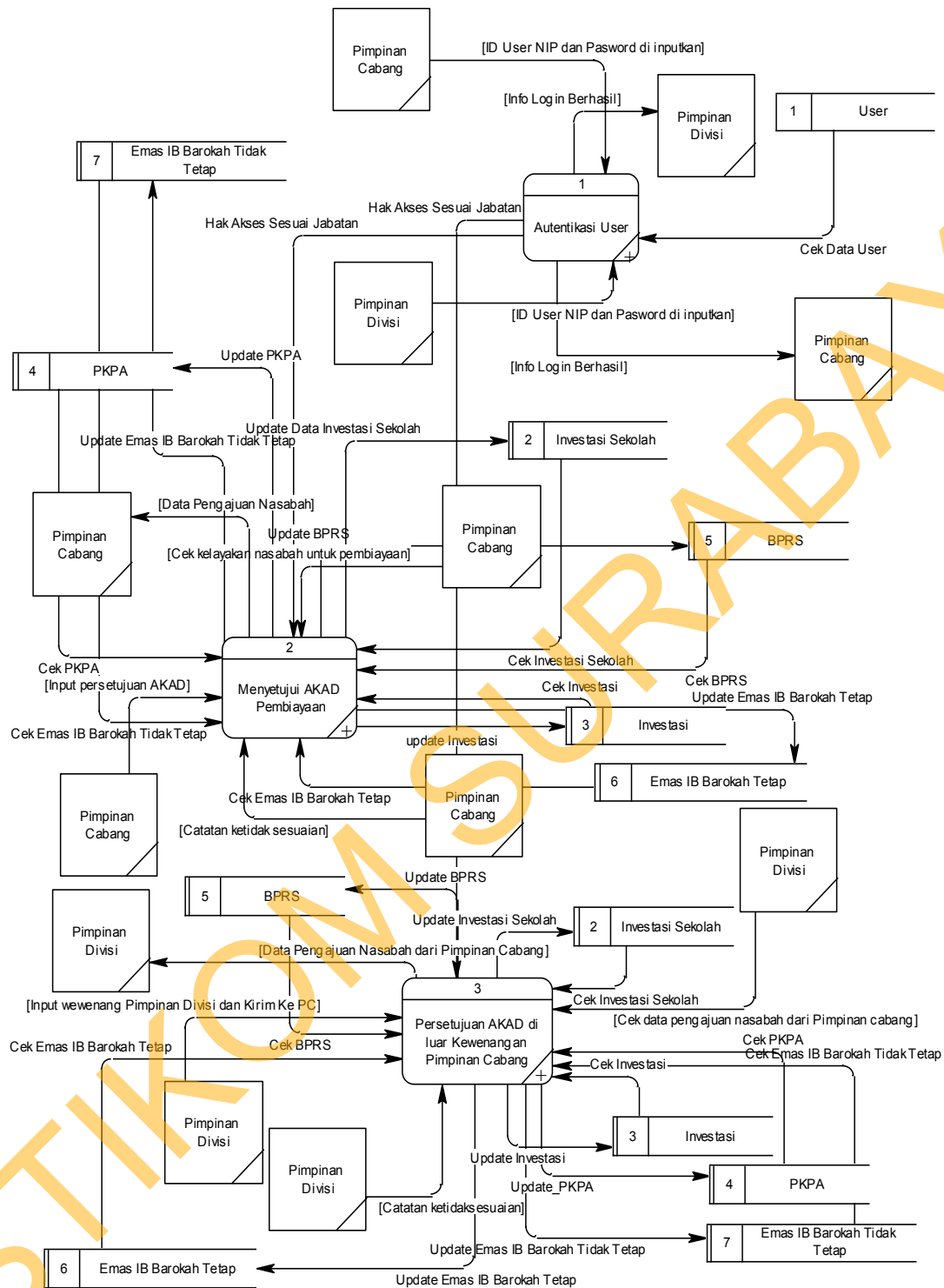
Context diagram dari sistem informasi *E-Loan System* menggambarkan proses secara umum yang terjadi pada Pembiayaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Timur (Unit Syariah). Dalam Context Diagram ini melibatkan 2 entity yaitu : Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi.



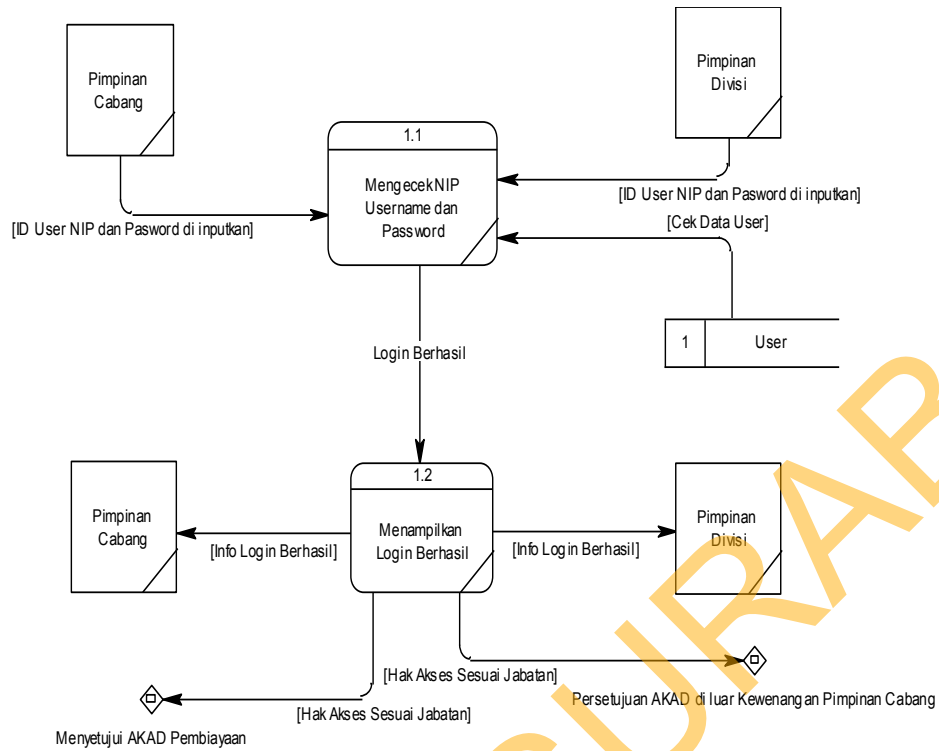
Gambar 4.6 Diagram Konteks Sistem Informasi *Approval E-Loan System*

2.2.5 DFD Level 0 Sistem Informasi *Approval E-Loan System*



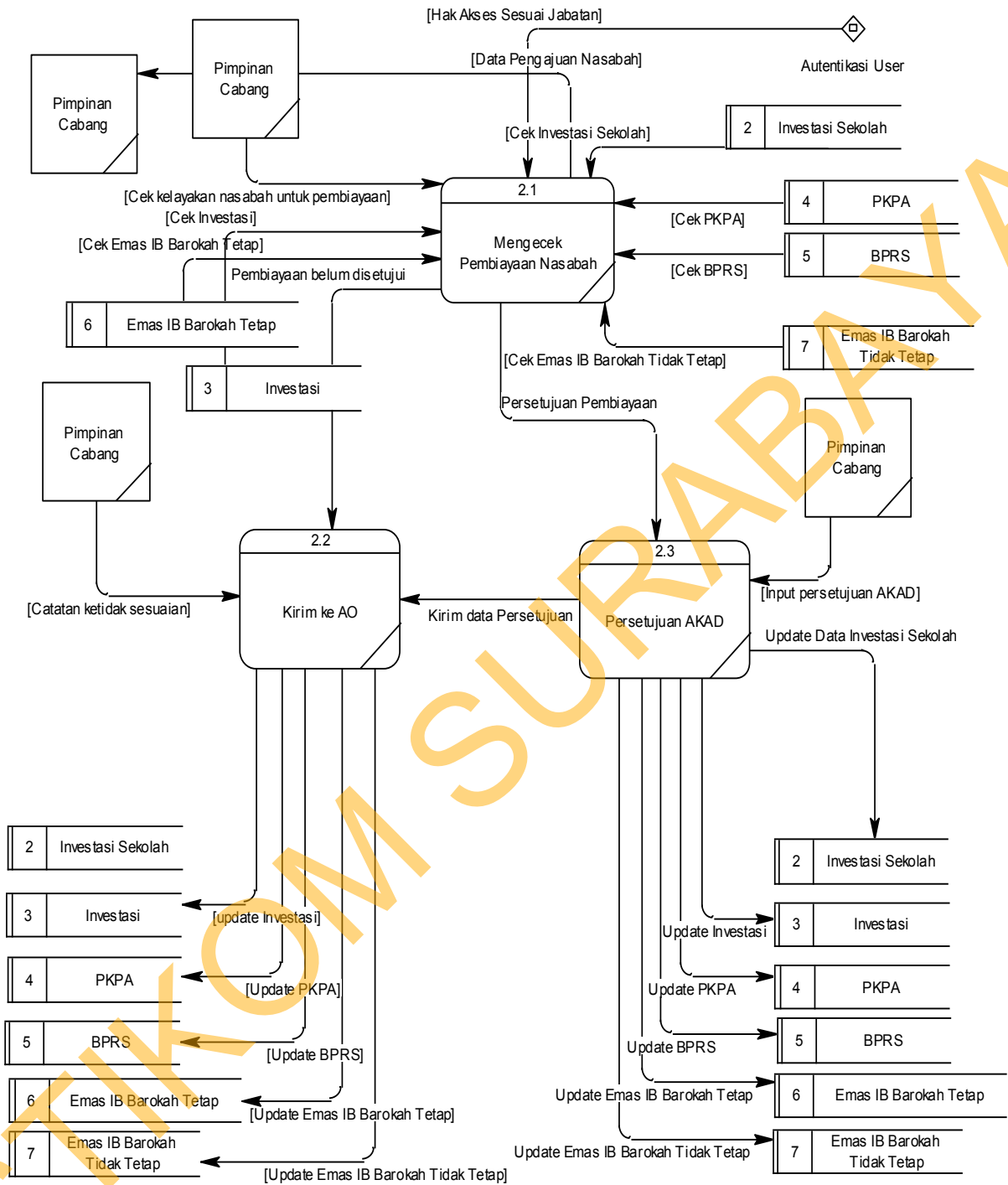
Gambar 4.7 DFD Level 0 Sistem Informasi *E-Loan System*

2.2.6 DFD Level 1 Autentikasi User



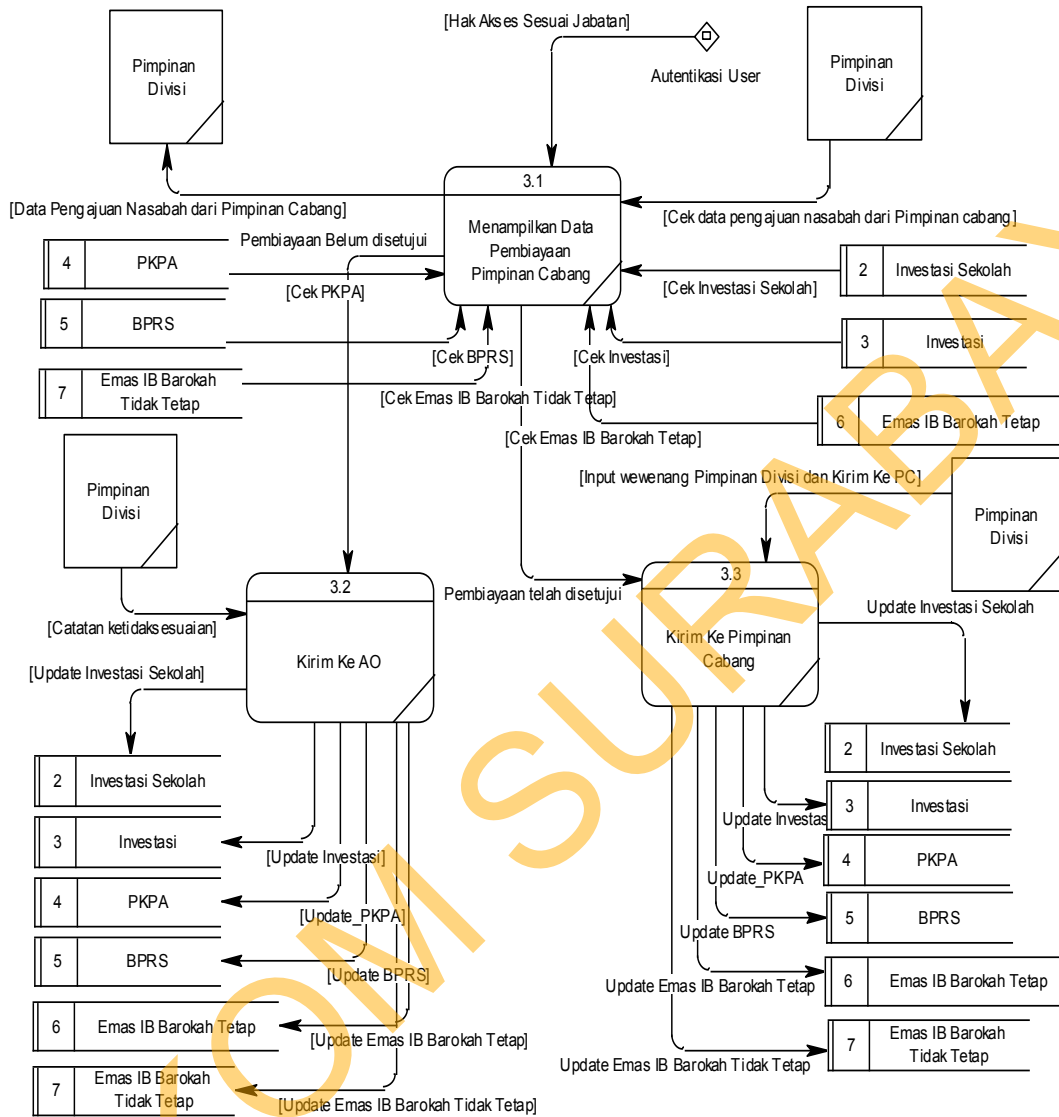
Gambar 4.8 DFD Level 1 Autentikasi User

2.2.7 DFD Level 1 Menyetujui AKAD Pembiayaan



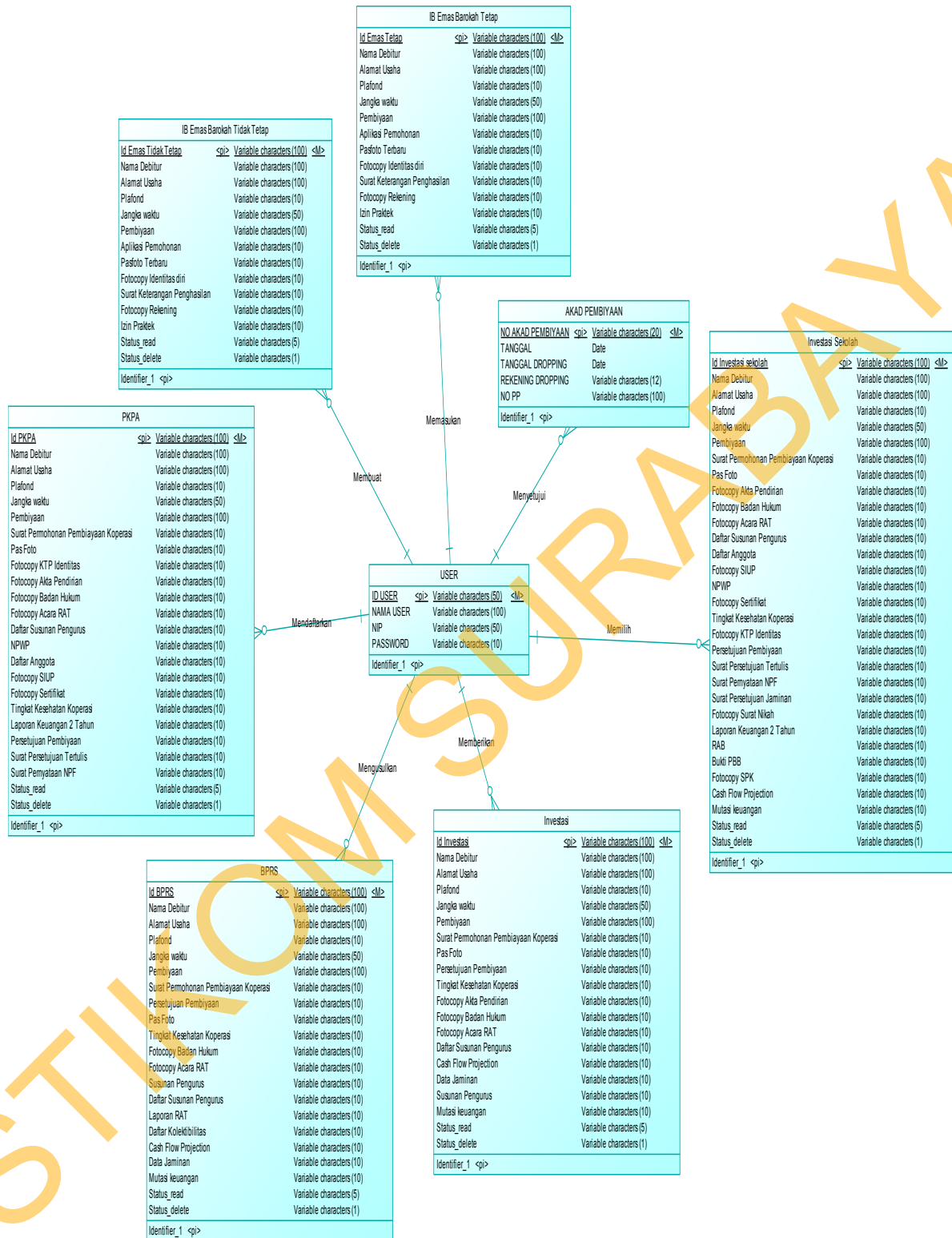
Gambar 4.9 DFD Level 1 Menyetujui AKAD Pembiayaan

2.2.8 DFD Level 1 Persetujuan AKAD Diluar Pimpinan Cabang



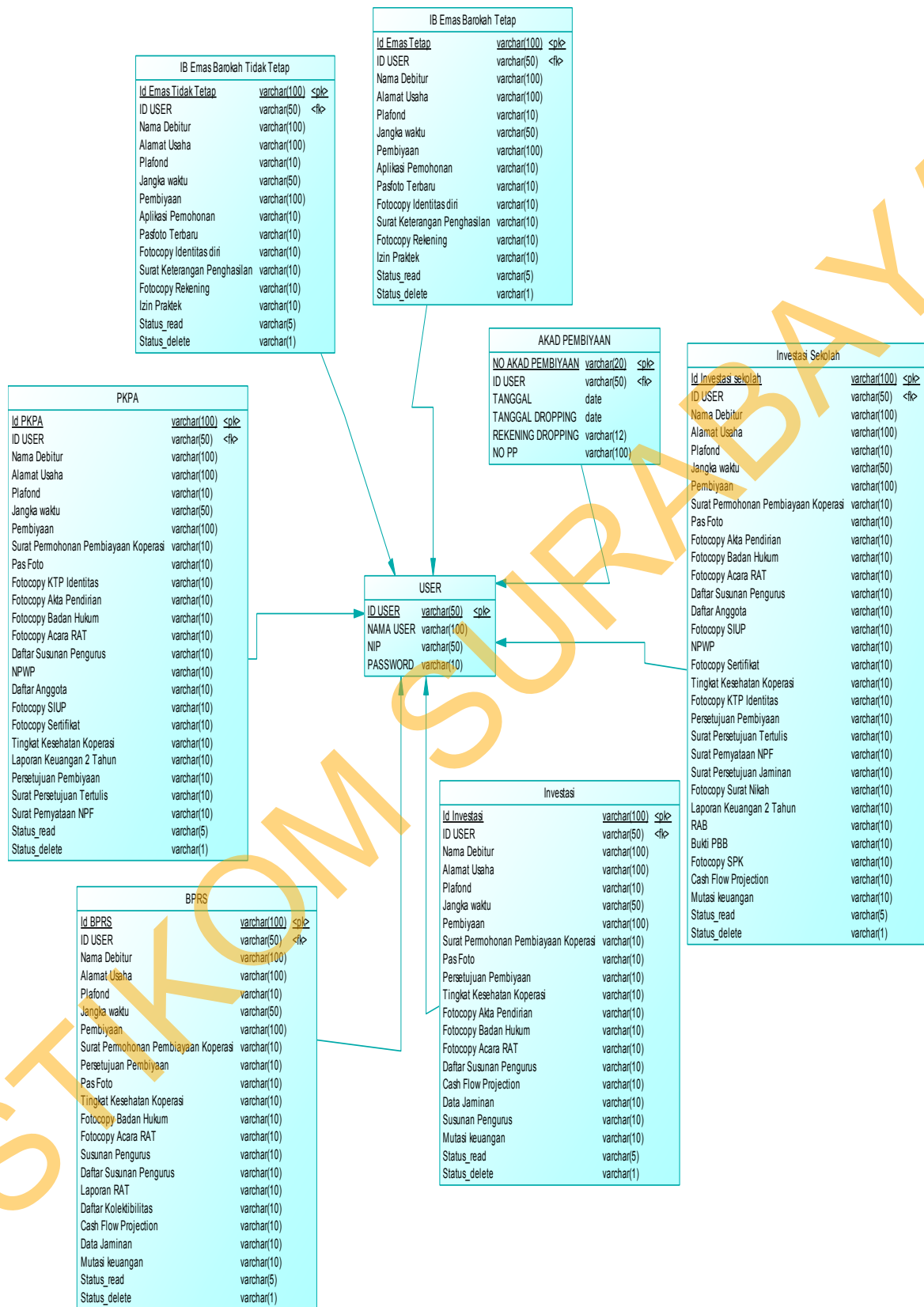
Gambar 4.10 DFD Level 1 Persetujuan AKAD diluar kewenangan Pimpinan Cabang

2.2.9 Conceptual Data Model (CDM)



Gambar 4.11 CDM Sistem Informasi Approval E-Loan System

2.2.10 Physical Data Model (PDM)



Gambar 4.12 PDM Sistem Informasi Approval E-Loan System

2.2.11 Struktur Tabel

Dalam pengembangan sistem informasi *Approval E-Loan System* ini, digunakan beberapa tabel untuk menyimpan berbagai data yang penting. Tabel tersebut adalah Tabel User, Tabel Investasi, Tabel Investasi Sekolah, Tabel PKPA, Tabel BPRS, Tabel Emas IB Barokah Tetap, Tabel Emas IB Barokah Tidak Tetap dan Tabel AKAD. Berikut akan dijelaskan tentang tabel-tabel yang digunakan.

A. Tabel User

Primary key : Id User

Foreign key : -

Fungsi : Untuk menyimpan data User dan memberikan Hak akses pada setiap usernya pada PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur (Unit Syariah)

Tabel 4.1 Stuktur Tabel User

Field	Tipe	Panjang	Keterangan
Id User	<i>Varchar</i>	10	
NIP	<i>Varchar</i>	50	
Password	<i>Varchar</i>	50	

B. Tabel Investasi

Primary key : Id Investasi

Foreign key : Id User

Fungsi : Untuk menyimpan data nasabah uang melakukan pembiyaan investasi

Tabel 4.2 Stuktur Tabel Investasi

Field	Tipe	Panjang	Keterangan
Id Investasi	<i>Varchar</i>	100	Primary Key
Id User	<i>Varchar</i>	100	Foreign Key
Nama Debitur	<i>Varchar</i>	100	
Alamat Usaha	<i>Varchar</i>	100	
Plafond	<i>Varchar</i>	100	
Jangka waktu	<i>Varchar</i>	100	
Surat Permohonan Pembiayaan Koperasi	<i>Varchar</i>	100	
Pas foto	<i>Varchar</i>	10	
Persetujuan Pembiayaan	<i>Varchar</i>	10	
Tingkat Kesehatan Koperasi	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Akta Pendirian	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Acar RAT	<i>Varchar</i>	10	
Daftar Susunan Pengurus	<i>Varchar</i>	10	
Cash flow projection	<i>Varchar</i>	10	
Data Jaminan	<i>Varchar</i>	10	
Susunan pengurus	<i>Varchar</i>	10	
Mutasi Keuangan	<i>Varchar</i>	10	

C. Tabel Investasi Sekolah

Primary key : Id Investasi Sekolah

Foreign key : Id User

Fungsi : Untuk menyimpan data nasabah yang mengajukan pembiayaan investasi sekolah

Tabel 4.3 Struktur Tabel Investasi Sekolah

Field	Type	Panjang	Keterangan
Id Investasi Sekolah	<i>Varchar</i>	100	Primary Key
Id User	<i>Varchar</i>	100	Foreign Key
Nama Debitur	<i>Varchar</i>	100	
Alamat Usaha	<i>Varchar</i>	100	
Plafond	<i>Varchar</i>	100	
Jangka waktu	<i>Varchar</i>	100	
Surat Permohonan Pembiayaan Koperasi	<i>Varchar</i>	100	
Pas foto	<i>Varchar</i>	10	
Persetujuan Pembiayaan	<i>Varchar</i>	10	
Tingkat Kesehatan Koperasi	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Akta Pendirian	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Acar RAT	<i>Varchar</i>	10	
Daftar Susunan	<i>Varchar</i>	10	

Pengurus			
Cash flow projection	<i>Varchar</i>	10	
Data Jaminan	<i>Varchar</i>	10	
Susunan pengurus	<i>Varchar</i>	10	
Mutasi keuangan	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Sertifikat	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy KTP Identitas	<i>Varchar</i>	10	
Surat persetujuan tertulis	<i>Varchar</i>	10	
Surat pernyataan NPF	<i>Varchar</i>	10	
Surat persetujuan Jaminan	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy surat nikah	<i>Varchar</i>	10	
Laporan keuangan 2 tahun	<i>varchar</i>	10	
RAB	<i>Varchar</i>	10	
Bukti PBB	<i>Varchar</i>	10	
Status_Read	<i>Int</i>	5	
Status_Delete	<i>Int</i>	5	

D. Tabel PKPA

Primary key : Id Pkpa

Foreign key : Id User

Fungsi : Untuk menyimpan data nasabah yang mengajukan pembiayaan PKPA

Tabel 4.4 Struktur Tabel PKPA

Field	Tipe	Panjang	Keterangan
Id PKPA	<i>Varchar</i>	100	Primary Key
Id User	<i>Varchar</i>	100	Foreign Key
Nama Debitur	<i>Varchar</i>	100	
Alamat Usaha	<i>Varchar</i>	100	
Plafond	<i>Varchar</i>	100	
Jangka waktu	<i>Varchar</i>	100	
Surat Permohonan Pembiayaan Koperasi	<i>Varchar</i>	100	
Pas foto	<i>Varchar</i>	10	
Pembiayaan	<i>Varchar</i>	10	
Tingkat Kesehatan Koperasi	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Akta Pendirian	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Acar RAT	<i>Varchar</i>	10	
Daftar Susunan Pengurus	<i>Varchar</i>	10	
Cash flow projection	<i>Varchar</i>	10	
Data Jaminan	<i>Varchar</i>	10	
Susunan pengurus	<i>Varchar</i>	10	

NPWP	<i>Varchar</i>	10	
Daftar anggota	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy SIUP	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy sertifikat	<i>Varchar</i>	10	
Surat persetujuan tertulis	<i>Varchar</i>	10	
Surat pernyataan NPF	<i>Varchar</i>	10	
Status_Read	<i>Int</i>	5	
Status_delete	<i>Int</i>	5	

E. Tabel BPRS

Primary key : Id Bprs

Foreign key : Id User

Fungsi : Untuk menyimpan data nasabah yang melakukan pembiayaan BPRS

Tabel 4.5 Struktur Tabel BPRS

Field	Tipe	Panjang	Keterangan
Id BPRS	<i>Varchar</i>	100	Primary Key
Id User	<i>Varchar</i>	100	Foreign Key
Nama Debitur	<i>Varchar</i>	100	
Alamat Usaha	<i>Varchar</i>	100	
Plafond	<i>Varchar</i>	100	
Jangka waktu	<i>Varchar</i>	100	
Surat Permohonan	<i>Varchar</i>	100	

Pembiayaan Koperasi			
Pas foto	<i>Varchar</i>	10	
Persetujuan Pembiayaan	<i>Varchar</i>	10	
Tingkat Kesehatan Koperasi	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Badan Hukum	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Acara RAT	<i>Varchar</i>	10	
Daftar Susunan Pengurus	<i>Varchar</i>	10	
Cash flow projection	<i>Varchar</i>	10	
Data Jaminan	<i>Varchar</i>	10	
Susunan pengurus	<i>Varchar</i>	10	
Mutasi Keuangan	<i>Varchar</i>	10	
Daftar Kolektibilitas	<i>Varchar</i>	10	
Status_read	<i>Int</i>	5	
Status_delete	<i>Int</i>	5	

F. Tabel Emas IB Barokah tetap

Primary key : Id Emas IB Barokah Tetap

Foreign key : Id User

Fungsi : Untuk menyimpan data nasabah yang melakukan pembiayaan Emas IB barokah Tetap

Tabel 4.6 Struktur Tabel Emas IB Barokah Tetap

Field	Tipe	Panjang	Keterangan
Id Emas IB Barokah Tetap	<i>Varchar</i>	100	Primary Key
Id User	<i>Varchar</i>	100	Foreign Key
Nama Debitur	<i>Varchar</i>	100	
Alamat Usaha	<i>Varchar</i>	100	
Plafond	<i>Varchar</i>	100	
Jangka waktu	<i>Varchar</i>	100	
Pembiayaan	<i>Varchar</i>	100	
Aplikasi Permohonan	<i>Varchar</i>	10	
Pas Foto Terbaru	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Identitas Diri	<i>Varchar</i>	10	
Surat Keterangan Penghasilan	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Rekening	<i>Varchar</i>	10	
Surat Kuasa	<i>Varchar</i>	10	
Status_Read	<i>Int</i>	5	
Status_delete	<i>Int</i>	5	

G. Tabel Emas IB Barokah Tidak Tetap

Primary key : Id Emas IB Barokah Tidak tetap

Foreign key : Id User

Fungsi : Untuk menyimpan data nasabah yang melakukan pembiayaan Emas IB Barokah tidak tetap

Tabel 4.7 Struktur Tabel Emas IB Barokah Tidak tetap

Field	Type	Panjang	Keterangan
Id Emas IB Barokah Tetap	<i>Varchar</i>	100	Primary Key
Id User	<i>Varchar</i>	100	Foreign Key
Nama Debitur	<i>Varchar</i>	100	
Alamat Usaha	<i>Varchar</i>	100	
Plafond	<i>Varchar</i>	100	
Jangka waktu	<i>Varchar</i>	100	
Pembiayaan	<i>Varchar</i>	100	
Aplikasi Permohonan	<i>Varchar</i>	10	
Pas Foto Terbaru	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Identitas Diri	<i>Varchar</i>	10	
Surat Keterangan Penghasilan	<i>Varchar</i>	10	
Fotocopy Rekening	<i>Varchar</i>	10	
Izin Praktek	<i>Varchar</i>	10	
Status_Read	<i>Int</i>	5	
Status_Delete	<i>Int</i>	5	

H. Tabel AKAD

Primary key : No Akad Pembiayaan

Foreign key : Id User

Fungsi : Untuk menyimpan data AKAD yang sudah disetujui oleh Pimpinan Cabang.

Tabel 4.8 Struktur Tabel AKAD

Field	Type	Panjang	Keterangan
No Akad Pembiayaan	<i>Varchar</i>	100	Primary Key
Id User	<i>Varchar</i>	100	Foreign Key
Tanggal	<i>Date</i>		
Tanggal Dropping	<i>Date</i>		
Rekening Dropping	<i>Varchar</i>	12	
No PP	<i>Varchar</i>	100	

2.3 Kebutuhan Sistem

2.3.1 Hardware

Perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi adalah computer dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Processor Intel Core 2 Duo minimal 2.00 Ghz
2. Memory minimal 1.00 Gb
3. Harddisk minimal 40 Gb

2.3.2 Software

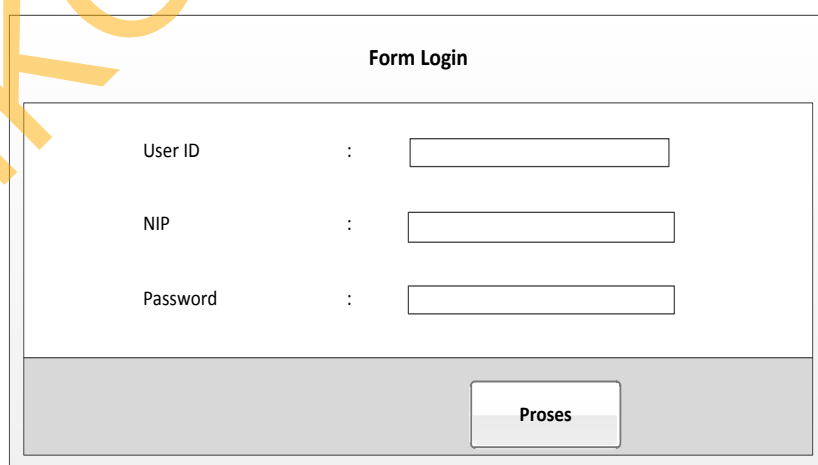
Perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi adalah sebagai berikut :

1. Xampp
2. Web Browser (chrome, Mozilla Firefox, Opera, dll)
3. Windows 7 Professional 32/64 bit

2.4 Desain Input Output

Desain Input Output ini dapat kita lakukan sebelum desain interface yang sesungguhnya kita buat dengan melalui program. Dengan desain ini, para user dapat membayangkan apakah sistem yang akan dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Jika ya, maka penulis dapat meneruskan dengan membuat program, jika tidak maka penulis harus membuat lagi desain yang baru sampai desain tersebut disetujui oleh pengguna. Dengan desain ini, diharapkan antara pengguna dan penulis dapat bekerja sama sehingga aplikasi dapat dibuat. Dalam sistem ini ini terdapat beberapa desain input dan output, antara lain:

2.4.1 Desain Input Login



Form Login	
User ID	: <input type="text"/>
NIP	: <input type="text"/>
Password	: <input type="text"/>
<input type="button" value="Proses"/>	

Gambar 4.13 Desain Input Form Login

Form login ini digunakan untuk masuk kedalam sistem dan menentukan hak akses *user* dalam sistem, antara lain sebagai *Account officer*, Penyelia, Pimpinan Cabang, Pimpinan Divisi. Form ini terdapat satu button dan tiga *textbox* untuk mengolah semua proses *login*.

2.4.2 Desain Input Output Investasi Sekolah

The image shows a web form titled "PEMBIAYAAN INVESTASI SEKOLAH". The form is organized into two columns of input fields. The left column includes: "Nama Cabang" (a dropdown menu with "Cabang" selected), "Nomor Rekening", "Nama Debitur", "Alamat", "Kota", "No Telepon", "No Hand Phone", and "Status" (a dropdown menu with "Status" selected). The right column includes: "Email", "Jumlah Pembiayaan" (with a "Rp" prefix), "Jangka waktu", "Guna Pinjam", and "NOTE". At the bottom right of the form, there are two buttons: "Kirim" and "Batal". A large watermark "STIKOM SURABAYA" is overlaid diagonally across the form.

Gambar 4.14 Desain Input Form Investasi Sekolah

oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi. Dimana dalam form tersebut terdapat inputan pada note yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada aktor utama.

2.4.3 Desain Input Output Investasi Usaha

The screenshot shows a web form titled "PEMBIAYAAN INVESTASI USAHA". It features a two-column layout of input fields. The left column includes: "Nama Cabang" (a dropdown menu with "Cabang" selected), "Nomor Rekening", "Nama Debitur", "Alamat", "Kota", "No Telepon", "No Hand Phone", and "Status" (a dropdown menu with "Status" selected). The right column includes: "Email", "Jumlah Pembiayaan" (with a "Rp" prefix), "Jangka waktu", "Guna Pinjam", and "NOTE". At the bottom right, there are two buttons labeled "Kirim" and "Batal". A large watermark "STIKOM SURABAYA" is overlaid diagonally across the form.

Gambar 4.15 Desain Input Form Investasi Usaha

Form Pembiayaan Investasi Usaha merupakan form edit yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi. Dimana dalam form tersebut terdapat inputan pada note yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada aktor utama.

2.4.4 Desain Input Output BPRS

The screenshot shows a web form titled "PEMBIAYAAN BPRS". It features a two-column layout of input fields. The left column includes: "Nama Cabang" (a dropdown menu with "Cabang" selected), "Nomor Rekening", "Nama Debitur", "Alamat", "Kota", "No Telepon", "No Hand Phone", and "Status" (a dropdown menu with "Status" selected). The right column includes: "Email", "Jumlah Pembiayaan" (with a "Rp" prefix), "Jangka waktu", "Guna Pinjam", and "NOTE". At the bottom right, there are two buttons labeled "Kirim" and "Batal". A large watermark "STIKOM SURABAYA" is overlaid diagonally across the form.

Gambar 4.16 Desain Input Form BPRS

Form Pembiayaan BPRS merupakan form edit yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi. Dimana dalam form tersebut terdapat inputan pada note yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada aktor utama. Dalam form tersebut juga terdapat status yang berfungsi untuk menentukan apakah status tersebut disetujui, tidak disetujui, atau melebihi kewenangan untuk di ambil keputusan *approve* dan tidaknya pembiayaan BPRS yang diajukan oleh nasabah.

2.4.5 Desain Input Output PKPA

The image shows a web form titled "PEMBIAYAAN PKPA". It contains the following fields and controls:

- Nama Cabang**: A dropdown menu with "Cabang" selected.
- Nomor Rekening**: A text input field.
- Nama Debitur**: A text input field.
- Alamat**: A text input field.
- Kota**: A text input field.
- No Telepon**: A text input field.
- No Hand Phone**: A text input field.
- Status**: A dropdown menu with "Status" selected.
- Email**: A text input field.
- Jumlah Pembiayaan**: A text input field with "Rp" as a prefix.
- Jangka waktu**: A text input field.
- Guna Pinjam**: A text input field.
- NOTE**: A text input field for providing a message to the actor.
- Kirim** and **Batal**: Two buttons at the bottom right for submitting or canceling the form.

Gambar 4.16 Desain Input Form PKPA

Form Pembiayaan PKPA merupakan form edit yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi. Dimana dalam form tersebut terdapat inputan pada note yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada aktor utama.

2.4.6 Desain Input Output IB Emas Barokah Tetap

PEMBIAYAAN IB EMAS BAROKAH TETAP

Nama Cabang :

Nomor Rekening :

Nama Nasabah :

Jenis ID (KTP/SIM) :

Nomor ID :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir :

Alamat :

Kota :

No Telepon :

No Hand Phone :

Kantor Nasabah :

Jabatan :

Lama Bekerja :

Gaji / Bulan :

Bonus / Tahun :

Email :

Jumlah Pembiayaan :

Jangka waktu :

Guna Pinjam :

Gambar 4.16 Desain Input Form IB Emas Barokah Tetap

akan oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi. Dimana dalam form tersebut terdapat inputan pada note yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada aktor utama.

2.4.7 Desain Input Output IB Emas Barokah Tidak Tetap

PEMBIAYAAN IB EMAS BAROKAH TIDAK TETAP

Nama Cabang :

Nomor Rekening :

Nama Nasabah :

Jenis ID (KTP/SIM) :

Nomor ID :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir :

Alamat :

Kota :

No Telepon :

No Hand Phone :

Kantor Nasabah :

Jabatan :

Lama Bekerja :

Gaji / Bulan :

Bonus / Tahun :

Email :

Jumlah Pembiayaan :

Jangka waktu :

Guna Pinjam :

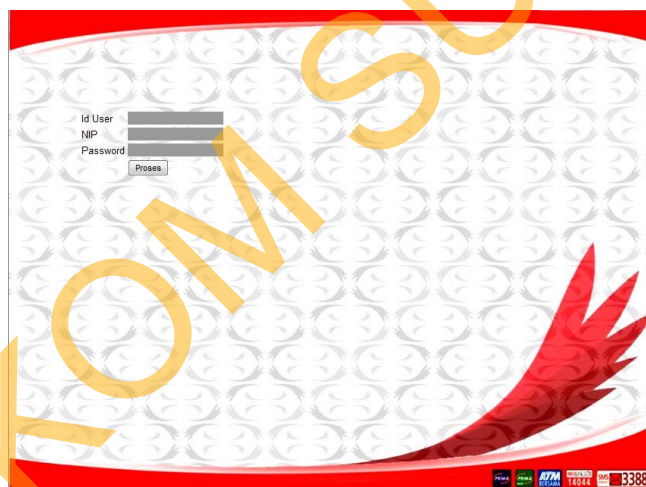
Gambar 4.17 Desain Input Form IB Emas Barokah Tidak Tetap

Form Pembiayaan IB Emas Barokah Tidak Tetap merupakan form edit yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi. Dimana dalam form tersebut terdapat inputan pada note yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada aktor utama. Dalam form tersebut juga terdapat status yang berfungsi untuk menentukan apakah status tersebut disetujui, tidak disetujui, atau melebihi kewenangan untuk di ambil keputusan *approve* dan tidaknya pembiayaan IB Emas Barokah Tidak Tetap yang diajukan oleh nasabah.

2.5 Implementasi Input Output

2.5.1 Form Autentikasi User

Form Autentikasi User ini adalah salah satu pengaman ketika akan akan masuk kedalam aplikasi, pengguna memasukkan Id User, NIP setiap anggota dan Password.



Gambar 4.18 Form Autentikasi User

2.5.2 Form Halaman Utama Pimpinan Cabang

Form halama utama, didalam terdapat beberapa sub menu seperti, Master Jabatan, Master Pegawai, Master Perusahaan, Master Kiriman, Mencatat Surat Masuk, Mencatat

Surat Keluar, Mencatat Surat Pengantar dan Mencetak Laporan. Implementasi dari form ini adalah sebagai berikut :



Gambar 4.19 Form Menu Utama Pimpinan Cabang

2.

Form ini berfungsi untuk melihat pembiayaan yang masuk dan memberikan keputusan dari Pimpinan Cabang apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak



Gambar 4.20 Form Investasi Sekolah Pimpinan Cabang

Gambar tersebut adalah tampilan dari data Investasi Sekolah dimana dalam tampilan seorang Pimpinan Cabang mampu mengedit dengan memberikan catatan untuk dikirim AO, dan apabila melebihi wewenang maka akan dikirim ke Pimpinan Divisi untuk di setuju atau tidak. Dalam gambar di atas apabila pilih edit maka akan muncul nama debitur, cabang,

tempat dan tanggal lahir, jumlah pembiayaan, guna pinjam, kota, jangka waktu, email, no telepon, dan note, status.

2.5.4 Form Investasi Usaha Pimpinan Cabang

Form ini berfungsi untuk melihat pembiayaan Investasi Usaha yang masuk dan memberikan keputusan dari Pimpinan Cabang apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak dan mungkin saja bisa melebihi kewenangan.

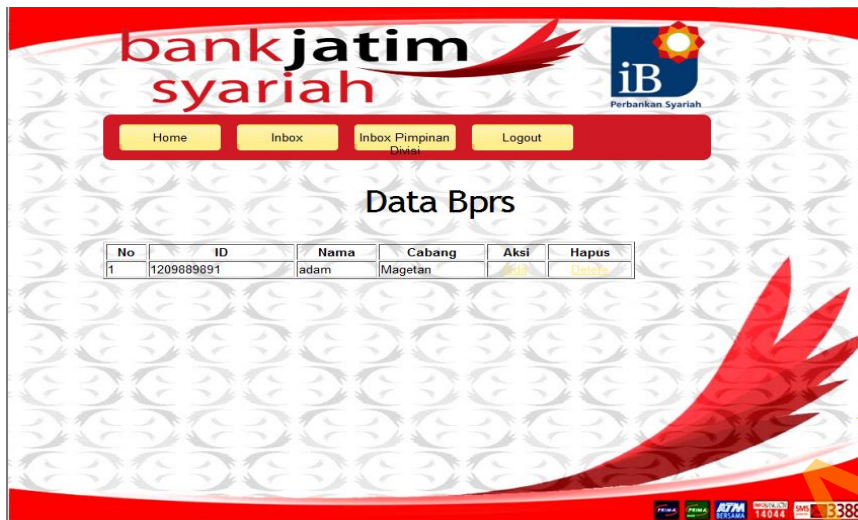
No	ID	Nama	Cabang	Aksi	Hapus
1	IU78899668	Pidesia	Gresik	Edit	Delete

Gambar 4.21 Form Investasi Usaha Pimpinan Cabang

Gambar tersebut adalah tampilan dari data Investasi Usaha dimana dalam tampilan seorang Pimpinan Cabang mampu mengedit dengan memberikan catatan untuk dikirim AO, dan apabila melebihi wewenang maka akan dikirim ke Pimpinan Divisi untuk di setuju atau tidak. Dalam gambar di atas apabila pilih edit maka akan muncul nama debitur, cabang, tempat dan tanggal lahir, jumlah pembiayaan, guna pinjam, kota, jangka waktu, email, no telepon, dan note, status.

2.5.5 Form BPRS Pimpinan Cabang

Form ini berfungsi untuk melihat pembiayaan BPRS yang masuk dan memberikan keputusan dari Pimpinan Cabang apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak dan mungkin saja bisa melebihi kewenangan.



Gambar 4.22 Form BPRS Pimpinan Cabang

Gambar tersebut adalah tampilan dari data BPRS dimana dalam tampilan seorang Pimpinan Cabang mampu mengedit dengan memberikan catatan untuk dikirim AO, dan apabila melebihi wewenang maka akan dikirim ke Pimpinan Divisi untuk di setujui atau tidak. Dalam gambar di atas apabila pilih edit maka akan muncul nama debitur, cabang, tempat dan tanggal lahir, jumlah pembiayaan, guna pinjam, kota, jangka waktu, email, no telepon, dan note, status.

2.5.6 Form PKPA Pimpinan Cabang

Form ini berfungsi untuk melihat pembiayaan PKPA yang masuk dan memberikan keputusan dari Pimpinan Cabang apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak dan mungkin saja bias melebihi kewenangan.



Gambar 4.23 Form Pembiayaan PKPA Pimpinan Cabang

Gambar tersebut adalah tampilan dari data PKPA dimana dalam tampilan seorang Pimpinan Cabang mampu mengedit dengan memberikan catatan untuk dikirim AO, dan apabila melebihi wewenang maka akan dikirim ke Pimpinan Divisi untuk di setujui atau tidak. Dalam gamabr di ata apabila pilih edit maka akan muncul nama debitur, cabang, tempat dan tanggal lahir, jumlah pembiayaan, guna pinjam, kota, jangka waktu, email, no telepon, dan note, status.

2.5.7 Form IB Emas Barokah Tetap Pimpinan Cabang

Form ini berfungsi untuk melihat pembiayaan IB Emas Barokah Tetap yang masuk dan memberikan keputusan dari Pimpinan Cabang apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak dan mungkin saja bias melebihi kewenangan.



Gambar 4.24 Form IB Emas Barokah Tetap

Gambar tersebut adalah tampilan dari data IB Emas Barokah Tetap dimana dalam tampilan seorang Pimpinan Cabang mampu mengedit dengan memberikan catatan untuk dikirim AO, dan apabila melebihi wewenang maka akan dikirim ke Pimpinan Divisi untuk di setujui atau tidak. Dalam gamabr di ata apabila pilih edit maka akan muncul nama debitur, cabang, tempat dan tanggal lahir, jumlah pembiayaan, guna pinjam, kota, jangka waktu, email, no telepon, dan note, status.

cabang, tempat dan tanggal lahir, jumlah pembiayaan, guna pinjam, kota, jangka waktu, email, no telepon, dan note, status.

2.5.8 Form Utama Pimpinan Divisi

Form ini adalah berisi kiriman pembiayaan dari Pimpinan Cabang yang melebihi kewenangannya sehingga dibutuhkan putusan dari Pimpinan Divisi untuk menyetujui atau tidak yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan pengajuan pembiayaan



Gambar 4.25 Form Halaman Utama Pimpinan Divisi

Gambar tersebut adalah tampilan dari Pimpinan Divisi yang sama seperti tampilan Pimpinan Cabang. Form diatas memberikan persetujuan dari Pimpinan Divisi yang diberikan dari Pimpinan Divisi untuk di setujui oleh Pimpinan Divisi.

BAB V

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Dari proses pengembangan Sistem Informasi Pencatatan Pembiayaan dan Approval pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) Kantor Pusat Surabaya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat memberikan kemudahan dalam proses pencatatan Pembiayaan yang masuk, serta pengambilan keputusan tentang pembiayaan yang disetujui
2. Proses pembiayaan lebih cepat dan efektif dikarenakan tidak memerlukan proses yang lama untuk pengajuan pembiayaan.
3. Diharapkan mampu menghasilkan laporan pembiayaan dan data nasabah yang di approve secara cepat, karena pada aplikasi ini mampu mengirim data nasabah baru dan pihak atasan melakukan persetujuan pengajuan pembiayaan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah).

2.2 Saran

Dalam Aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Pembiayaan dan *Approval* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) Kantor Pusat Surabaya, terdapat beberapa kelemahan yang disadari oleh penulis. Penulis memiliki beberapa saran dalam pengembangan sistem ini kedepannya, yaitu antara lain :

1. Dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja dari sistem informasi ini sehingga mampu berjalan secara optimal
2. Dibutuhkan SDM yang handal dalam menjalankan sistem informasi ini sehingga memperkecil kesalahan dalam sistem ini.

STIKOM SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA

Wangsawidjaja. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.

Agung Prabowo, Bagya. (2012). *Aspek hukum pembiayaan murabahah pada perbankan syariah*. UII Press.

Fatah, Nanang. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Rosda: PT. Remaja Rosdakarya.

Muliadi, Ahmad. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Akademia.

STIKOM SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA

Wangsawidjaja. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.

Agung Prabowo, Bagya. (2012). *Aspek hukum pembiayaan murabahah pada perbankan syariah*. UII Press.

Fatah, Nanang. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Rosda: PT. Remaja Rosdakarya.

Muliadi, Ahmad. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Akademia.

STIKOM SURABAYA